

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN  
ANGGARAN 2020 ( LKPJ ATA 2020)  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**



**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

TAPAN, 20 JANUARI 2021  
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



**AFLIZEN, S.Sos**  
Penata Tk. I /III.d  
NIP.19720605 199303 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Halaman

1

DAFTAR ISI		2
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Dasar Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	8
	2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	8
BAB V	PENUTUP	13



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Camat Lengayang Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang No. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKPJ Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan LKPJ Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan LKPJ Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2020 guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berikutnya.

## BAB II

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

#### 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)	Persen	85%	85 %	Tingkat kepuasan masyarakat meningkat terhadap pelayanan menggambarkan tingkat pelayanann kepada masyarakat semakin membaik
1.	Peningkatan nilai LAKIP	Nilai	BB	BB	Capaian Realisasi Nilai LAKIP telah mencapai Target untuk Tahun akan datang lebih dapat ditingkatkan lagi.
2.	Peningkatan kualitas	Nagari	10	10	Sistem pengelolaan Administrasi

	pemerintahan Nagari				Pemerintahan dan keuangan Nagari yang tertib menggambarkan Fasilitas, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan semakin membaik.
--	---------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi /Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu	Tingkat kepuasan masyarakat	Penanggung Jawab : <u>Kasi Pelayanan</u> Sumber Data : Semua OPD
Meningkatkan Nilai LAKIP	Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai evaluasi dari Inspektorat	Penanggungjawab : Sekcam Sumber Data : : Semua OPD
Meningkatkan kualitas Pemerintahan nagari	Peningkatan kualitas pemerintahan Nagari yang baik	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang tertib	Penanggungjawab Kasi Pemerintahan dan Pemb. Masy dan Perekonomian Sumber Data : Kasi Pemerintahan dan Pemb.Masy & Perekonomian



**TABEL 2.2**  
**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang difasilitasi	85 %	85 %	85%	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang perizinan	0	0	0
						Program Pembangunan wawasan kebangsaan	0	0	0
						Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.850.000	11.365.000	95,91 %
						Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari	9.762.500	9.762,500	100 %
						Program Pengembangan lingkungan sehat	0	0	0
						Program Peningkatan IMTAQ	1.375.000	1.375.000	100 %
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.790.000	6.790.000	100 %

2	<b>Peningkatan Nilai LAKIP</b>	Target Nilai LAKIP OPD	BB	BB	BB	Pelayanan Administrasi Perkantoran	212.208.750	210.660.186	99,27 %
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.690.350	68.468.550	99,68 %
3	<b>Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari</b>	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang tertib	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa/Nagari	3.022.500	3.022.500	100 %
<b>Jumlah</b>							<b>313.699.100</b>	<b>311.443.736</b>	<b>99,28</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR CAMAT  
BASA AMPEK BALAI TAPAN ANGGARAN  
TAHUN 2020.**

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN		BELANJA (Rp)			
			ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
20. URUSAN OTONOMI						
14. KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN						
	I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	313.699.100.-	311.443.736.	2.255.364	99,28 %
			212.208.750	210.660.186	1.548.564	99,27 %
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.200.000	6.132.586.	1.067.414.	85,17.%
	2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	47.450.838.	47.432.500.	18.338.	99,96.%
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67.389.530.	67.381.600.	7.930	99,99. %
	5	Penyediaan alat tulis kantor	19.812.067.	19.778.400.	33.667.	99,83 %
	6	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	7.051.000.	6.999.000.	52.000.-	99,26.%
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik / pe nerangan bangunan kantor	2.144.315	2.135.500.	8.815.	99,59 %
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	1.440.000.	1.440.000.	0,-	100,00.%
	9	Penyediaan makanan dan minuman	11.875.000.	11.730.000.	145.000.	98,78 %
	10	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.350.000.	1.225.000.	125.000.	90,74.%
	11	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	41.985.000.	41.925.000.-	60.000.	99,86.%
	12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	4.511.000,	4.480.600,-	30.400	99,33
	II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASA RANA APARATUR	68.690.350	68.468.550	221.800	99,68.%
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	23.240.000	23.190.000	50.000	99,78 %
	2	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	2.000.000.	2.000.000.	0	100%
	3	Pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor.	18.000.000.	17.862.000.	138.000	99,23 %
	4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan gedung kantor	5.000.000.	4.995.000	5.000,-	99,90 %
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	20.450.350	20.421.550	5.000	99,90 %
	III	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT				
		Fasilitasi dan pembinaan lingkungan sehat	0	0	0	0
	IV	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	11.850.000	11.365.000	485.000	95,91
		Fasilitasi Masalah Trantibmas dan Pertanahan	11.850.000	11.365.000	485.000	95,91
	V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT/NAGARI	9.762.500	9.762.500	0	100 %
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi	9.762.500	9.762.500	0	100 %



VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.790.000	6.790.000	0	100 %
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	6.790.000	6.790.000	0	100 %
VII	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN				
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	0	0	0	0
VIII	<b>Program Pembinaan Pengelolan Keuangan Desa/Nagari</b>	3.022.500	3.022.500.	0	100.%
	Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan pemerintahan Nagari	3.022.500	3.022.500.	0	100.%
IX	<b>PROGRAM Peningkatan IMTAQ.</b>	1.375.000	1.375.000	0	100.%
	Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan,	1.375.000	1.375.000	0	100.%
X	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				
	Pelaksanaan Upacara HUT RI	0	0	0	0

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA 2020) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka

selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.